

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Semakin majunya perkembangan jaman, persaingan antar perusahaan terutama yang bergerak di bidang yang serupa juga akan semakin ketat. Perusahaan memerlukan suatu sistem yang mampu menyebabkan suatu perusahaan dapat menjalankan setiap kegiatannya berjalan dengan lancar dan hasilnya memuaskan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyusun sistem pengendalian dari dalam internal perusahaan. Sistem pengendalian internal merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional perusahaan atau organisasi tertentu (Lathifah, 2021). Suatu perusahaan yang memiliki sistem pengendalian internal akan lebih tertata dan sistematis dibandingkan dengan perusahaan yang sama sekali tidak memiliki sistem pengendalian internal. Operasi perusahaan yang dijalankan jika dimonitor secara berkala dan rutin akan memungkinkan perusahaan mampu mewujudkan *going concern* baik dari sisi pengendalian internal akuntansi maupun dari pengendalian internal administrasi. Perusahaan yang memiliki sistem pengendalian internal mampu menemukan dan mengevaluasi setiap celah yang terjadi dalam setiap peristiwa memerlukan

perhatian khusus untuk memajukan perusahaan. Definisi dari pengendalian internal terbagi dalam beberapa pendapat ahli yaitu IFAC (*International Federation of Accountants*), dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan COSO (*Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*) (Sudarmanto & dkk, 2021).

IFAC mendefinisikan pengendalian internal lebih mengarah pada meminimalisir risiko. Menurut IFAC untuk mencapai suatu tujuan organisasi (atau perusahaan), organisasi atau perusahaan perlu memiliki pengendalian internal. Dengan adanya pengendalian internal, risiko yang mungkin terjadi di dalam organisasi atau perusahaan akan mudah untuk dikelola, dipahami, dan diawasi. Risiko yang dapat dimonitor akan memudahkan organisasi atau perusahaan mencapai tujuannya. Terkadang terdapat beberapa organisasi atau perusahaan yang takut untuk mengambil risiko sehingga sudut pandang ini sesuai dengan cara pandang IFAC terhadap sistem pengendalian internal. Sedangkan definisi pengendalian internal menurut OJK memiliki fokus pada peningkatan efisiensi, keamanan aset, ketelitian data, meningkatkan kedisiplinan dan ketaatan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lain suatu entitas yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan dan kepatuhan ((COSO), 2013).

COSO (*Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*) 2013 merupakan revisi dari versi tahun 1992 yang diharapkan

mampu memudahkan pelaksanaan pengendalian internal di seluruh dunia dan juga mampu meningkatkan kinerja organisasi suatu perusahaan sehingga menjadi lebih terstruktur. COSO memang terkenal di kalangan swasta karena disponsori dan didanai oleh beberapa asosiasi dan lembaga akuntansi profesional seperti American Accounting Association (AAA), American Institute of CPAs (AICPA), Financial Executives International (FEI), Institute of Management Accountants (IMA), dan The Institute of Internal Auditors (IIA) (Schandl & L. Foster, 2019).



Gambar 1 Hubungan Tujuan dan Komponen COSO

2.2 Tujuan COSO

Kinerja organisasi atau perusahaan bergantung pada keputusan manajemen (*decision maker*) dalam membuat keputusan melalui perancangan dan penetapan strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu program akan dijalankan bila berguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang menguntungkan bagi suatu organisasi atau perusahaan. Sistem pengendalian dari sisi COSO (*Committee of Sponsoring Organization of the Treadway*

Commission) diterapkan untuk mencapai tiga tujuan antara lain sebagai berikut (Schandl & L. Foster, 2019).

a. Efektivitas dan efisiensi operasi

Efektivitas merupakan suatu upaya organisasi atau perusahaan untuk menjalankan operasinya sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Secara singkat, dengan berjalannya efektivitas, maka organisasi atau perusahaan mampu untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu yang sebelumnya telah ditargetkan selama proses pelaksanaan pekerjaan. Hal ini dikarenakan sudah adanya rencana yang telah disiapkan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan sehingga arah atau alur kegiatan akan berjalan dengan sendirinya dan prosesnya terstruktur. Untuk mencapai tingkat efektivitas yang tinggi perlu untuk meningkatkan partisipasi sehingga terbentuk kerja sama yang baik untuk setiap elemen dalam organisasi atau perusahaan.

Efisien adalah suatu upaya organisasi atau perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dan tepat dengan tujuan yang ditetapkan dengan lebih memperhatikan pada penghematan waktu, tenaga, dan biaya. Keberhasilan efisiensi bergantung pada sumber daya manusia yang melaksanakan pelaksanaan pekerjaan. Sumber daya yang berkualitas mengetahui hal-hal yang harus dilakukan sehingga mampu melaksanakan pekerjaan dengan tepat tanpa membuang waktu, tenaga, dan biaya. Di sisi lain, sumber daya yang berkualitas tentu juga akan menghasilkan output yang maksimal.

Manajemen perlu menyelaraskan antara indikator efektivitas dan efisiensi untuk mencapai hasil operasi yang maksimal. Jika terdapat salah satu indikator yang tidak maksimal maka akan menghambat pekerjaan dan hasilnya juga tidak akan maksimal.

b. Keandalan pelaporan keuangan

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan setiap kegiatan operasional. Tujuan dari laporan keuangan sendiri adalah menyediakan informasi keuangan entitas pelapor yang berguna bagi investor ekuitas saat ini dan calon investor ekuitas, pemberi jaminan, dan kreditur lain dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2013). Laporan keuangan menjadi salah satu alat pertimbangan bagi pihak luar untuk mengetahui gambaran keadaan entitas. Pentingnya peran laporan keuangan sebagai alat pertimbangan investor, perusahaan perlu menyusunnya dengan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga laporan dapat dikatakan andal.

c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Ketika perusahaan menetapkan sebuah keputusan atau kebijakan, pasti akan disertai dengan peraturan dan hukum sebagai pedoman pelaksanaan suatu kegiatan. Peraturan dan hukum dibentuk untuk ditaati setiap sumber daya manusia didalamnya yang terlibat. Dengan adanya peraturan dan hukum, setiap kegiatan memiliki landasan yang kuat, terstruktur, dan

memiliki arah yang sama. Aturan yang ditaati dan hukum yang diperhatikan dengan cermat oleh setiap elemen perusahaan dengan sendirinya akan mengarahkan pada pencapaian tujuan yang maksimal tanpa adanya faktor-faktor penghambat dan kesalahan yang terjadi.

2.3 Komponen Sistem Pengendalian Internal Berdasarkan COSO

Sistem pengendalian internal dari sudut pandang COSO, komponen COSO terbagi menjadi lima komponen. Dalam setiap komponen COSO terdapat beberapa prinsip yang berkaitan atau relevan dengan setiap komponennya. Terdapat 17 (tujuh belas) prinsip yang terkandung dalam lima komponen (Schandl & L. Foster, 2019). Lima komponen tersebut antara lain adalah.

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan unsur dari sistem pengendalian internal yang paling sederhana. Organisasi atau perusahaan khususnya dari manajemen sebagai pihak yang berwenang untuk mengambil keputusan harus menetapkan ketentuan atau kebijakan setiap elemen-elemen pembangun perusahaan agar mampu menjalankan operasional yang sistematis dan terstruktur. Lingkungan pengendalian akan menentukan kualitas suatu organisasi atau perusahaan karena kualitas akan terbentuk dengan sendirinya bergantung pada kemampuan perusahaan dalam mengatur urusan internal organisasi atau perusahaan.

Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam komponen lingkungan pengendalian terbagi menjadi lima antara lain adalah.

1. Integritas dan nilai-nilai etika

Suatu operasi perusahaan tidak hanya dijalankan oleh satu atau dua orang melainkan operasi yang baik dijalankan oleh sekumpulan orang yang memiliki arah yang sama. Maka dari itu perusahaan perlu menjunjung tinggi nilai integritas dan nilai etika. Integritas adalah sikap jujur yang harus tertanam di setiap individu anggota perusahaan. Dengan adanya integritas, tingkat kepercayaan antara individu satu dengan yang lain akan tetap terjaga dengan baik. Sedangkan nilai etika adalah suatu sikap individu dalam menyikapi suatu hal. Etika seseorang mencerminkan sikap baik atau buruknya seseorang. Etika yang baik mampu menghasilkan hubungan komunikasi antar individu yang baik sehingga terbentuk koordinasi yang baik.

2. Tanggung jawab pengawasan

Setiap kegiatan operasional pasti memerlukan pertanggungjawaban dari pelaksana operasi. Sedangkan dari pihak manajemen perlu melakukan pengawasan sebagai bentuk tanggung jawab dalam rangka mengatur strategi untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh manajer akan membantu pelaksanaan kegiatan operasional untuk menghasilkan output yang maksimal. Selain itu juga dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama proses pelaksanaannya.

3. Penetapan struktur, wewenang, dan tanggung jawab

Penataan susunan setiap komponen perusahaan atau organisasi perlu dibentuk terlebih dahulu sebelum kegiatan perusahaan dimulai. Penetapan struktur, wewenang, dan tanggung jawab akan melancarkan setiap tahapan operasional tanpa adanya benturan antara tanggung jawab satu sama lain. Dengan jelasnya pembagian susunan organisasi atau perusahaan, setiap individu akan menyadari tugas yang dimiliki sehingga akan langsung memahami apa yang harus dilakukan.

4. Komitmen terhadap kompetisi

Tanpa adanya kompetisi, perusahaan tidak akan berkembang untuk menjadi lebih baik. Akan tetapi, manajemen perlu memastikan bahwa kompetisi yang terjadi antar individu sifatnya positif atau persaingan yang sehat tanpa saling menjerumuskan. Jika setiap individu memiliki sifat selalu ingin mengembangkan diri atau berkompetisi maka kemajuan perusahaan dapat dipastikan akan meningkat dengan pesat.

5. Menegakkan akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip yang sangat penting sehingga harus ditekankan oleh manajemen. Ketika manajemen atau pengawas menanyakan hal-hal terkait dengan kegiatan operasional, pihak pelaksana harus mampu menjelaskannya dengan jelas dan disertai dengan bukti-bukti yang kuat.

b. Penilaian Risiko

Risiko adalah suatu ketidakpastian suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Ketidakpastian ini bermakna bahwa peristiwa tersebut belum terjadi, mungkin terjadi, dapat atau tidak terjadi (Pasaribu & Krisnaldy, 2019). Oleh karena itu, manajemen perlu melakukan suatu upaya dengan cara mempertimbangkan sebab akibat dari berjalannya suatu aktivitas operasi. Prinsip-prinsip yang terkait dengan komponen penilaian risiko adalah.

1. Menentukan tujuan yang sesuai

Arah atau tujuan kemana perusahaan ingin berjalan harus ditetapkan saat awal pembentukan perusahaan. Dengan adanya satu fondasi kuat, kemungkinan adanya risiko yang muncul akan lebih diminimalisir.

2. Mengidentifikasi dan menganalisis risiko

Manajemen dapat melakukan penelaahan atas risiko yang muncul di periode sebelumnya sebagai gambaran untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko.

3. Menilai risiko *fraud*

Risiko yang muncul dari seseorang dapat disebabkan oleh ketidakpahaman atas suatu hal terkait dengan aktivitasnya, akan tetapi risiko juga dapat timbul dari kecurangan atau penipuan seseorang yang memiliki tujuan lain yang menyimpang dari tujuan perusahaan. Orang yang memiliki keinginan tertentu tersebut akan mencari celah dan mencari cara agar manajemen tidak mengetahui tindakannya. Oleh

karena itu, manajemen harus meningkatkan kinerjanya untuk lebih intensif dalam mengawasi dan mencegah adanya tindak kecurangan yang merugikan.

4. Mengidentifikasi dan menganalisis perubahan signifikan

Perubahan keadaan internal perusahaan seperti kebijakan dan struktur mampu menghasilkan beberapa respon yang berbeda. Respon beragam dapat muncul baik dari sistem kegiatan operasi maupun setiap individu apakah keduanya bisa merespon dengan baik atau justru menimbulkan risiko yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, manajemen perlu mengawasi dengan cermat atas perubahan yang baru dilaksanakan.

c. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah tindakan (umumnya dijelaskan dalam kebijakan, prosedur, dan standar) yang membantu manajemen mengurangi risiko untuk memastikan pencapaian tujuan (Schandl & L. Foster, 2019). Prinsip yang berkaitan dengan komponen aktivitas pengendalian adalah.

1. Memiliki dan mengembangkan aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah komponen yang sangat penting dan komponen yang akan mempengaruhi keberlangsungan suatu perusahaan. Tanpa adanya pengendalian, risiko akan semakin berkembang dan sulit untuk dikendalikan. Maka dari itu manajemen perlu memperhatikan dengan cermat langkah kebijakan apa yang harus diambil.

2. Memilih dan mengembangkan pengendalian umum atas teknologi

Kemajuan teknologi di era sekarang sangatlah pesat, akan sangat disayangkan jika kemajuan tersebut tidak dimanfaatkan perusahaan. Dengan adanya teknologi, setiap aktivitas dapat dilaksanakan dengan cepat dan dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Jika pelaksanaan pengendalian dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi maka perusahaan dapat mengatasi adanya risiko yang mungkin akan terjadi.

3. Menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan dan prosedur

Tidak hanya manajemen, setiap individu di dalam perusahaan harus mengetahui bahwa ketika terdapat risiko maka manajemen akan membuat suatu tindakan yang akan dirumuskan dalam kebijakan dan diimplementasikan melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dan disetujui bersama. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki sistem dan kinerja perusahaan agar lebih baik.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi adalah dua hal yang saling berhubungan erat. Hal ini karena komunikasi merupakan sumber datangnya informasi. Semakin banyak berkomunikasi maka informasi yang diperoleh juga akan semakin banyak. Setiap individu dalam perusahaan baik dari lini teratas sampai lini terbawah harus saling berkomunikasi untuk mendapatkan informasi dalam rangka mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan setiap aktivitas operasi perusahaan. Komunikasi tersebut merupakan

komunikasi internal. Komunikasi yang terjadi antara orang dalam perusahaan dengan pihak luar seperti pemegang saham, kreditur, dan sejenisnya disebut dengan komunikasi eksternal. Prinsip yang berkaitan dengan komponen informasi dan komunikasi adalah.

1. Menggunakan informasi yang relevan
2. Berkomunikasi secara internal
3. Berkomunikasi secara eksternal

e. Monitoring

Monitoring atau pemantauan adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh manajemen secara berkala dan terus-menerus. Komponen ini dilakukan untuk menentukan kualitas kinerja pengendalian internal yang telah diterapkan apakah sudah terlaksana dengan baik sebagai kesimpulan akhir yang telah melalui serangkaian penilaian dan pengambilan tindakan yang telah dilakukan. Pemantauan ini memiliki titik berat yang terbagi menjadi dua hal yaitu pemantauan atas kinerja dan pemantauan atas laporan keuangan. Prinsip yang berkaitan dengan komponen pemantauan adalah.

1. Melakukan evaluasi berkelanjutan dan/atau terpisah

Proses evaluasi akan lebih mudah jika dilakukan secara berkala dan terus menerus serta dilakukan pemisahan antara operasi satu dengan yang lain. Hal ini karena proses aktivitas operasi yang sangat kompleks yang dikerjakan oleh banyak orang membuat manajemen perlu melakukan pemantauan yang lebih terperinci dengan memisah sesuai dengan klasifikasinya.

2. Mengevaluasi dan mengkomunikasikan kekurangan

Setelah proses pemantauan selesai dilakukan manajemen akan mengevaluasi setiap temuan-temuan yang diperoleh dan akan mengkomunikasikan setiap kekurangan. Hasil evaluasi akan dibuat kesimpulan dan menjadi gambaran di periode mendatang untuk memuat suatu kebijakan atau strategi yang lebih baik.

2.4 Sistem Pengendalian Internal Piutang

Piutang merupakan suatu klaim yang diadakan terhadap pelanggan untuk uang, barang, jasa, dan lain-lain (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2013). Sedangkan perputaran piutang merupakan hubungan antara penjualan kredit dan piutang usaha (Wahyuni, Musa, & Akbar, 2018). Piutang termasuk dalam kelompok aset lancar dan akun yang bersifat akrual. Piutang terhubung dalam siklus penerimaan kas. Semakin tinggi nilai perputaran piutang maka semakin tinggi nilai piutang yang dapat dikonversikan ke dalam bentuk kas. Berdasarkan sudut pandang perusahaan, piutang adalah akun yang sangat berpengaruh dan dapat dikatakan material sehingga sistem pengendalian internal atas piutang sangat dibutuhkan. Sistem yang efisien dan efektif dapat meningkatkan kualitas piutang perusahaan.

Sistem pengendalian internal piutang yang baik tidak hanya dari kalkulasi akuntansinya saja melainkan dari sistem berjalannya perusahaan. Sistem sebagai penentu utama suatu perusahaan berjalan yang perlu ditelaah dengan baik untuk menghindari adanya kesalahan dan *fraud*. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan sistem pengendalian internal adalah

pembagian tugas dan fungsi, proses penagihan piutang, dan akuntansi yang dijalankan perusahaan.

Perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dan menjalankan rumah sakit memiliki piutang dalam bentuk piutang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Hal tersebut dilandasi oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam instrumen tersebut dijelaskan bahwa penyelenggara kesehatan meliputi semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Rumah sakit termasuk dalam fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan sehingga bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Piutang BPJS timbul dari jenis layanan yang dilakukan oleh perusahaan. Jenis layanan yang dilakukan rumah sakit antara lain adalah pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Oleh karena itu, dengan kompleksnya sistem perlu dilakukan pengendalian yang mampu memisahkan antara fungsi satu dengan yang lain agar tidak saling berbenturan dan jelas jika diminta pertanggungjawaban.